

## ABSTRACT

This study aims to analyzing factors which influenced the timeliness of Indonesia's government. This study examine the size of region's government, financial independency of region's government, wealthiness of region's government, and audit opinion.

Sampling method is purposive sampling and there are 33 of region's government in Indonesia. Using the secondary datas, which are the report financial investigation result of region's government in 2009-2013. There is interview analysis in one of the sample for making the hypotesis stronger.

The result of this study shows that the financial independency of region's government and audit opinion significantly positive to the timeliness, and region's government size and the wealthiness doesn't significant with the timeliness.

Keywords: Timeliness, region's government size, financial independency of region's government, wealthiness of region's government, and audit opinion.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pada pemerintah daerah provinsi se–Indonesia. Faktor–faktor yang diteliti adalah ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, Kekayaan pemerintah daerah dan opini audit.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 33 pemerintah daerah provinsi se–Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2009-2013. Peneliti ini juga menggunakan tambahan analisis wawancara pada salah satu sampel penelitian (Provinsi Lampung). Tambahan analisis ini bertujuan untuk memperkuat bukti hipotesis yang telah dilakukan pengujian dengan regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu.

Kata Kunci : Ketepatan waktu, ukuran pemda, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemda dan opini audit.